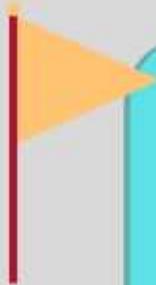


KATALOG: 4301002.7315



STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN PINRANG 2023

Volume 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

KATALOG: 4301002.7315

<https://pinrangkab.bps.go.id>

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN PINRANG 2023

Volume 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN PINRANG 2023

Volume 8, 2024

Katalog : 4301002.7315
Nomor Publikasi : 73150.24010
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv+67 halaman

Penyusun Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Pembuat Kover :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Penerbit :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Sumber Ilustrasi :
www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Tim Penyusun

**STATISTIK PENDIDIKAN
KABUPATEN PINRANG 2023
Volume 8, 2024**

Pengarah

Aryanto

Penanggung Jawab

Joko Siswanto

Penyunting

Ugiana Ramdhani

Penulis Naskah

Azwar Arafat Thanwir

Penata Letak

Azwar Arafat Thanwir

KATA PENGANTAR

Pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, sudah selayaknya direncanakan sebaik-baiknya untuk hasil yang berkualitas. Peserta didik diharapkan mampu bertahan dengan baik serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Publikasi dengan judul “Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2023” ini merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2023, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Pendidikan di Kabupaten Pinrang secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melek Huruf. Penyajian publikasi ini disusun secara deskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Pinrang, Juni 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang



Joko Siswanto



DAFTAR ISI
STATISTIK PENDIDIKAN
KABUPATEN PINRANG 2023
Volume 8, 2024

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	7
1.3. Sumber Data	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
METODOLOGI	13
2.1. Ruang Lingkup	13
2.2. Kerangka Sampel	14
2.3. Rancangan Sampel	15
2.4. Metode Pengumpulan Data	15
2.5. Pengolahan Data	16
BAB III	
KONSEP DAN DEFINISI	19



BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH 25

4.1. Angka Partisipasi Sekolah27

 4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....28

 4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun 29

4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA 32

BAB V

CAPAIAN PENDIDIKAN37

5.1. Angka Melek Huruf.....37

5.2. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi..... 41

5.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan..... 43

5.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)..... 44

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 49

6.1. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Siswa..... 49

6.2. Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru 50

BAB VII

PENUTUP 57

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2022 dan 2023	29
Tabel 2.	Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023.....	40
Tabel 3.	Persentase Penduduk Usia 7-23 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023...	42
Tabel 4.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, 2023.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023.....	30
Gambar 2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2023.....	34
Gambar 3.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023 ...	39
Gambar 4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023.....	44
Gambar 5.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Pinrang, 2019–2023.....	46
Gambar 6.	Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pinrang, 2023.....	51
Gambar 7.	Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2023.....	52
Gambar 8.	Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2023.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. RSE Angka Partispasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2023 65
- Lampiran 2. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2023 66
- Lampiran 3. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2023 67

<https://pinrangkab.bps.go.id>



<https://binrangkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai sebuah instrumen vital, pendidikan memainkan peran yang tak tergantikan dalam membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan individu yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Di Indonesia, peran pendidikan dalam pembangunan nasional semakin diperkuat dengan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan telah disepakati oleh para pemimpin dunia yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya pada Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan digitalisasi pendidikan. Kurikulum Merdeka, misalnya, dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Program Guru Penggerak bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan.

Digitalisasi pendidikan menjadi fokus utama terutama setelah pandemi COVID-19. Program seperti "Digital Classroom" dan peningkatan akses internet di sekolah-sekolah diharapkan dapat mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan literasi digital di kalangan siswa dan guru.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa

pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat **“MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA”**.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,

dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang. Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi “**Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2023**”.

Publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan maupun program

pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, capaian pembangunan pendidikan dapat ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, capaian pembangunan digambarkan melalui indikator ketersediaan infrastruktur sekolah dan tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan. Indikator tersebut merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dan Wilayah X Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2023/2024 serta Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

Dari sisi permintaan, capaian pembangunan digambarkan melalui indikator-indikator terkait partisipasi sekolah seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Selain itu, terdapat pula indikator yang menunjukkan kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf). Keseluruhan indikator tersebut bersumber dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023.

1.2. Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini, antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Kabupaten Pinrang.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Pinrang untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melakukan evaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3. Sumber Data

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor Maret 2023. Susenas merupakan survei semesteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Pinrang, sampelnya tersebar di 12 kecamatan yang mencakup seluruh wilayah baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, digunakan juga data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, data semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam lima bab, dilengkapi dengan tabel dan grafik dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian.

- BAB II. **METODOLOGI**, menyajikan metodologi penyusunan publikasi berisi ruang lingkup, kerangka sampel, rancangan sampel, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.
- BAB III. **KONSEP DAN DEFINISI**, menyajikan konsep dan definisi berisi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi.
- BAB IV. **PARTISIPASI SEKOLAH**, menyajikan pembahasan tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).
- BAB V. **CAPAIAN PENDIDIKAN**, menyajikan Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
- BAB VI. **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**, menyajikan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, dan rasio murid/siswa terhadap sekolah dan guru.
- BAB VII. **PENUTUP**, menyajikan kesimpulan.

<https://binrangkab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

BAB II

METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Maret tahun 2023. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. Ruang Lingkup

Susenas Maret 2023 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota baik merupakan daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Kabupaten Pinrang, jumlah sampelnya sebanyak 660 rumah tangga, tersebar dalam 66 blok sensus¹ di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel dicacah menggunakan kuesioner VSEN23.K dan VSEN23.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

2.2. Kerangka Sampel

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel yang lebih representatif.

1. Seluruh populasi blok sensus biasa hasil SP2020 distratifikasikan menurut klasifikasi urban/rural.
2. *Implicit stratification* rumah tangga dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah, untuk menjaga keterwakilan dari nilai keragaman karakteristik rumah tangga.

Master sampling frame yang digunakan dalam pelaksanaan Susenas Maret 2023 adalah sekitar 40 persen blok sensus dari populasi yang ditarik secara *probability proportional to size* (PPS)² dengan size jumlah Kepala Keluarga (KK) hasil Rekap Daftar Penduduk (RD) SP2020.

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah
 - a. Daftar blok sensus biasa SP2020
 - b. Daftar 40 persen blok sensus SP2020 yang sudah terdapat informasi kode strata.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar rumah tangga hasil pendaftaran (*listing*) rumah tangga di setiap blok sensus terpilih.

² *Proportional Probability to Size* (PPS) adalah salah satu desain pengambilan sampel di mana probabilitas setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini, unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilitas terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar.

2.3. Rancangan Sampel

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap.

Tahap 1:

- a) Memilih 40 persen blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan size jumlah KK hasil RD SP2020 di setiap strata di kabupaten.
- b) Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/ kota.

Tahap 2:

Memilih 10 rumah tangga hasil pendaftaran (listing) secara *systematic* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT).

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. Pengolahan Data

Pengolahan dilakukan mulai dari pengolahan manual (pra komputer) yang meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

<https://binrangkab.bps.go.id>

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Bersekolah** adalah apabila seseorang **terdaftar dan aktif** mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan non formal.
2. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

4. **Pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
5. **Pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
6. **Pendidikan tinggi** meliputi:
 - **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor. (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
 - **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan

diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

- **Pendidikan profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.
7. **Pendidikan non formal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan non forma; yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003.
 8. **Status pendidikan** adalah keadaan seseorang atau penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi:
 - a. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.

- b. Masih bersekolah** adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
- c. Tidak bersekolah lagi** adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.
- 9. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijasah.
- 10. Dapat membaca dan menulis** adalah jika seseorang sapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-ahri dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Orang tuna netra yang dapat membaca huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.

11. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
12. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
13. **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

<https://binrangkab.bps.go.id>

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH

Partisipasi sekolah menunjukkan keaktifan dan adanya keputusan penduduk untuk meningkatkan kapasitas diri dan membentuk modal manusia melalui pendidikan. Bersekolah merupakan suatu bentuk investasi yang membutuhkan biaya. Investasi tersebut akan menimbulkan peluang untuk mendapatkan pengembalian/keuntungan di masa depan (*rate of return to school*). Salah satu bentuk keuntungan yang mungkin akan diperoleh adalah upah/pendapatan yang lebih tinggi ketika bekerja dibanding orang lain yang berpendidikan lebih rendah.

Sebagai seorang investor, penduduk akan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk investasi saat ini dengan kemungkinan keuntungan di masa depan (Borjas, 2019). Apabila penduduk menganggap bahwa biaya investasi pendidikan yang akan dikeluarkan lebih kecil dari kemungkinan keuntungan di masa depan, maka ia akan memutuskan untuk melanjutkan sekolah.

Secara praktis, partisipasi sekolah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Setiap indikator akan diulas pada subbab berikut.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan dalam penghitungan APS.

Usia penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama usia 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua usia 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga usia 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi, ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan

anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Angka partisipasi pra sekolah untuk usia (0-6 tahun) di Kabupaten Pinrang adalah 21,35 persen pada tahun 2023. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 0-6 tahun, terdapat 21 orang sudah mengikuti pendidikan pra sekolah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,64 persen poin jika dibandingkan dengan partisipasi pra sekolah pada tahun 2022 (17,71 persen).

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2022 dan 2023

Karakteristik	Partisipasi Sekolah	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	21,57	22,66
Perempuan	13,36	19,94
Tipe Daerah		
Perkotaan	21,12	19,81
Perdesaan	15,91	22,19
Total	17,71	21,35

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan Susenas Maret 2023

4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok usia tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai tanpa melihat kelas dan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Penghitungan APS dikelompokkan untuk

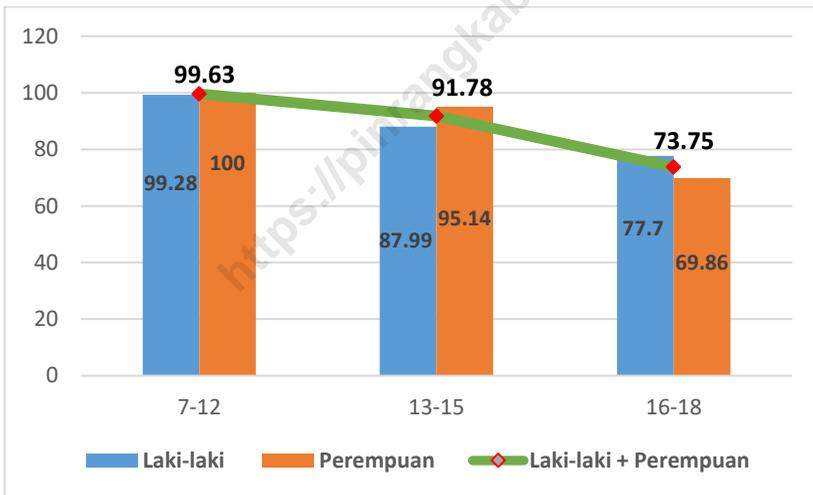
kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Secara matematis APS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$APS_{7-12 \text{ tahun}} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15 \text{ tahun}} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18 \text{ tahun}} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan hasil untuk APS Kabupaten Pinrang tahun 2023 seperti pada Gambar 1.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS 7-12 tahun sebesar 99,63 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Pinrang sedang

bersekolah. Sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 91,78 persen. Artinya, dari 100 penduduk berusia 13-15 tahun, terdapat 8 penduduk yang tidak bersekolah. Lain halnya pada kelompok umur 16-18 tahun, APS hanya mencapai 73,75 persen saja. Angka tersebut berarti dari 4 penduduk berusia 16-18 tahun, terdapat 1 penduduk yang tidak bersekolah.

Berdasarkan kelompok umur, APS menurun seiring bertambahnya umur. Rendahnya APS pada kelompok umur 16-18 tahun menandakan perlu adanya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pencapaian pendidikan seluruh penduduk usia sekolah. Selain itu, penduduk juga perlu melakukan perubahan pola pikir terhadap pentingnya pendidikan. Dengan demikian, penduduk akan memiliki preferensi dan dorongan yang kuat untuk bersekolah hingga jenjang yang tinggi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada kelompok umur 7-12 tahun tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara APS laki-laki dan perempuan. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS perempuan (95,14 persen) lebih tinggi jika dibandingkan dengan APS laki-laki (87,99 persen). Namun, pada kelompok umur 16-18 tahun APS perempuan (69,86 persen) lebih rendah daripada APS laki-laki yaitu 77,70 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dari sisi gender umur partisipasi sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Perempuan cenderung putus sekolah dalam usia yang lebih muda.

4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA

Selain APS masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Formula penghitungan APM untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

$$APM \text{ SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SD** usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM \text{ SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMP** usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

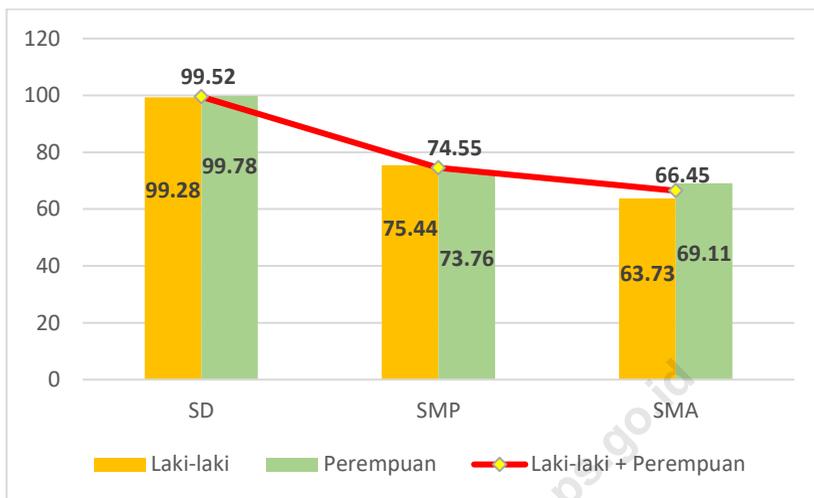
$$APM \text{ SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMA** usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Saat ini, APM tidak menjadi target Renstra Kemendikbud dan RPJMN 2020–2024. Ketepatan waktu bersekolah belum menjadi isu utama dalam agenda pendidikan di Indonesia. Pemerintah masih berfokus pada keikutsertaan semua penduduk dalam mengakses

pendidikan. Namun demikian, indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan. Indikator APM jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diperhitungkan sebagai bagian dari target 4.5, yaitu pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan (Bappenas, 2020).

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2023, APM SD di Kabupaten Pinrang mencapai 99,52 persen (Gambar 2). Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan umurnya, yaitu SD. Berdasarkan jenis kelamin, tidak terlihat adanya ketimpangan yang nyata antara APM laki-laki dan perempuan. Artinya, penduduk umur 7-12 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Pada jenjang SMP, APM tahun 2023 di Kabupaten Pinrang sebesar 74,55 persen. Artinya, dari 100 penduduk berusia 13-15 tahun, 74 hingga 75 penduduk telah bersekolah di jenjang yang tepat, yaitu SMP. Jika dilihat dari sisi gender, tidak terlihat ketimpangan antara APM laki-laki dan Perempuan yang signifikan. APM laki-laki lebih tinggi dari Perempuan selisih 1,68 persen poin.

Pada tahun 2023, APM SMA di Kabupaten Pinrang adalah 66,45 persen. APM SMA paling rendah jika dibandingkan dengan APM SD dan APM SMP. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan capaian APM SMA antara penduduk laki-laki dan perempuan tetapi tidak terlalu besar, dimana APM Perempuan lebih tinggi selisih 5.38 persen poin.

<https://binrangkab.bps.go.id>

BAB V

CAPAIAN PENDIDIKAN

BAB V

CAPAIAN PENDIDIKAN

5.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Indikator juga berperan sebagai ukuran keefektifan sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan (membaca dan menulis). Kemampuan keaksaraan merupakan kemampuan dasar yang dapat membantu seseorang dalam kegiatan sehari-hari untuk terus belajar, menggali informasi, dan berkomunikasi. Dengan demikian, seseorang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan (UNESCO, 2009).

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

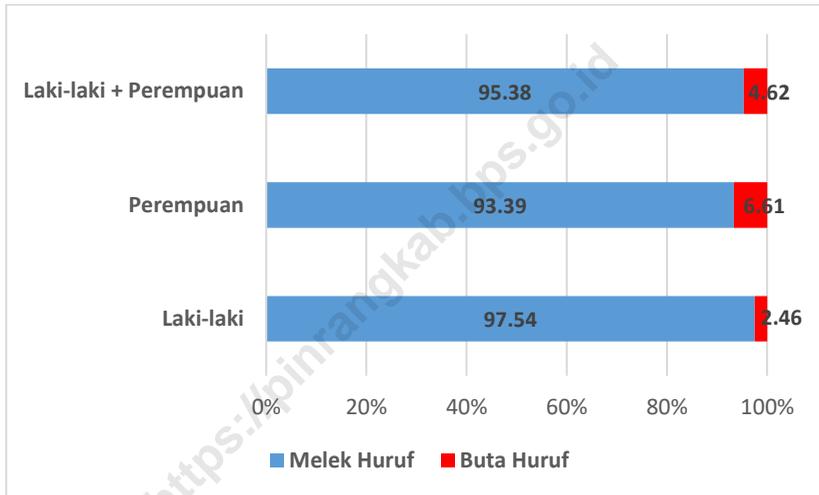
AMH menjadi salah satu indikator target SDGs pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis baik itu huruf latin maupun huruf lainnya mencapai 95,38 persen. Artinya dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas, terdapat 4 sampai 5 penduduk yang buta huruf. Angka ini mengalami perbaikan sebesar 0,56 persen poin jika dibandingkan dengan AMH tahun 2022 yaitu 94,82 persen. Dengan kata lain, kedepannya, kewajiban Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menuntaskan buta aksara adalah sebanyak 4,62 persen dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Pada tahun 2023 buta huruf pada penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Angka buta huruf laki-laki tahun 2023 sebesar 2,46 persen sedangkan angka buta huruf perempuan sebesar 6,61 persen, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022

yang terdiri dari angka buta huruf laki-laki 3,44 persen dan angka buta huruf Perempuan 6,82 persen. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen SDGs dapat terwujud tuntas di tahun tahun berikutnya.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 3. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok usia untuk membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Tabel 2 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun),

kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas), di Kabupaten Pinrang tahun 2023.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok usia 60 tahun ke atas atau pada kelompok lansia. Sebesar 19,04 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok usia dewasa (25-59 tahun) terdapat 1,76 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok usia remaja (15-24) tahun sebesar 0,68 persen. Hal ini bisa karena penduduk lanjut usia memiliki kemampuan keaksaraan yang kurang atau banyak yang sudah lupa bahkan tidak bisa baca tulis. Di sisi lain, program keaksaraan fungsional hanya dikhususkan untuk penduduk kelompok usia 15-59 tahun.

Tabel 2. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	-	0,39	13,49
Perempuan	1,36	3,04	23,46
Total	0,68	1,76	19,04

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Dilihat dari sisi gender, pada kelompok usia lansia (60 tahun keatas) dan dewasa, angka buta huruf perempuan lebih tinggi

dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terkait dengan norma sosial yang berlaku dan melekat pada perempuan untuk mengurus rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti pendidikan. Disamping itu, persepsi perempuan terutama lansia akan pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga hal ini menghambat keberhasilan program pengentasan buta aksara.

Ketimpangan kemampuan literasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan capaian AMH supaya dapat mewujudkan prinsip SDGs yaitu *“leave no one behind”*. Adanya peningkatan kemampuan literasi penduduk akan memberikan *multiplier effect* dalam pembangunan karena berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada partisipasi penduduk dalam ketenagakerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain-lain (UNESCO, 2013).

5.2. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah tersebut. Salah satu upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu dengan

melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu termasuk Program KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah turut melakukan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah salah satunya dengan menerapkan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selanjutnya, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, pemerintah melakukan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut perlu ditingkatkan. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2020–2024).

Tabel 3. Persentase Penduduk Usia 7-23 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	NA	43.36	11.86	20.37	23.86
Perempuan	NA	41.48	12.78	23.43	21.18

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN PINRANG 2023

Kabupaten Pinrang	0,83	42,45	12,31	21,86	22,55
-------------------	------	-------	-------	-------	-------

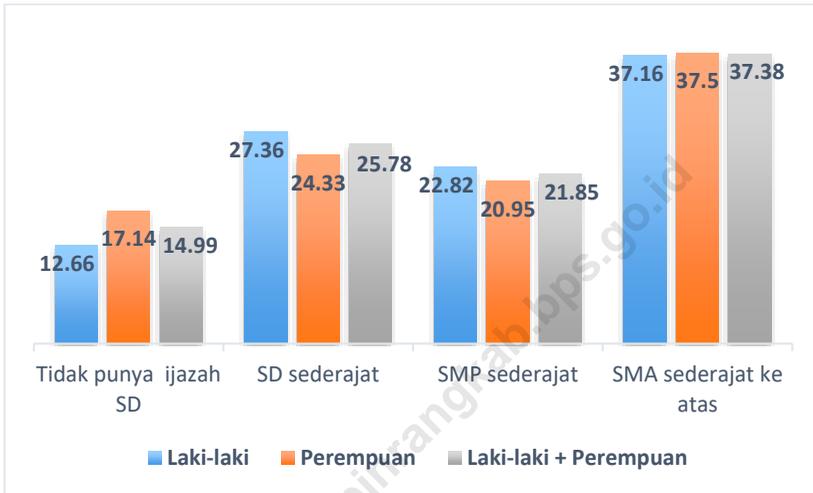
Catatan : 1Kelompok usia sekolah pada indikator pendidikan adalah 7-23 tahun, sesuai dengan Metadata SDGs.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada tahun 2023, tercatat penduduk Kabupaten Pinrang usia 7-23 tahun yang masih menempuh pendidikan (masih bersekolah) sebesar 77,45 persen. Namun demikian, masih terdapat penduduk Pinrang usia 7-23 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 0,83 persen.

5.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Pada tahun 2022 persentase penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SD dan SMP sebesar 47,63 persen, yang mempunyai ijazah SMA dan perguruan tinggi sebesar 37,38 persen, dan sisanya sebesar 14,99 persen penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah SD. Komposisi ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Pinrang masih relatif rendah karena proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan hingga pendidikan dasar lebih banyak dibanding penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2023

5.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani tidak termasuk tahun yang dihabiskan untuk penduduk yang mengulang karena tidak naik kelas. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki.

lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.



Sumber: BPS

Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Pinrang, 2019–2023

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 di atas, tahun 2023, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang tumbuh kecil sebesar 0,26 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang adalah

8,30 tahun atau setara dengan SMP/MTs kelas VIII hingga IX. Dengan melihat pola pergerakan capaian RLS antar tahun, maka diperkirakan dalam waktu dua tahun kedepan capaian RLS bertambah 0,18 tahun. Perkiraan capaian ini masih belum mencapai target RLS penduduk usia 15 tahun keatas yang tertera pada RPJMN sebesar 9,16 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya keras untuk meningkatkan terhadap akses pendidikan yang lebih merata tidak hanya berfokus di pusat kota saja tetapi juga untuk daerah sulit, di pinggiran kota ataupun kecamatan terpencil.

A stylized landscape illustration. The top half features a light blue sky with several rounded, teal-colored hills of varying heights. Below the hills is a green ground area with small white flowers and green leaves. The bottom half of the image is a solid blue background.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

6.1. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Siswa

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemerintah tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru	Jumlah Murid
	Negeri	Swasta	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	315	13	328	3.021	40.276
MI	1	28	29	281	3.156
SMP	52	5	57	1.364	13.133
MTS	1	25	26	354	3.929
SMA	11	4	15	527	7.697
MA	1	8	9	173	1.790
SMK	10	6	16	620	6.009
SLB	1	0	1	27	58
Total	392	89	481	6.297	76.048

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data semester ganjil tahun ajaran 2023/2024;

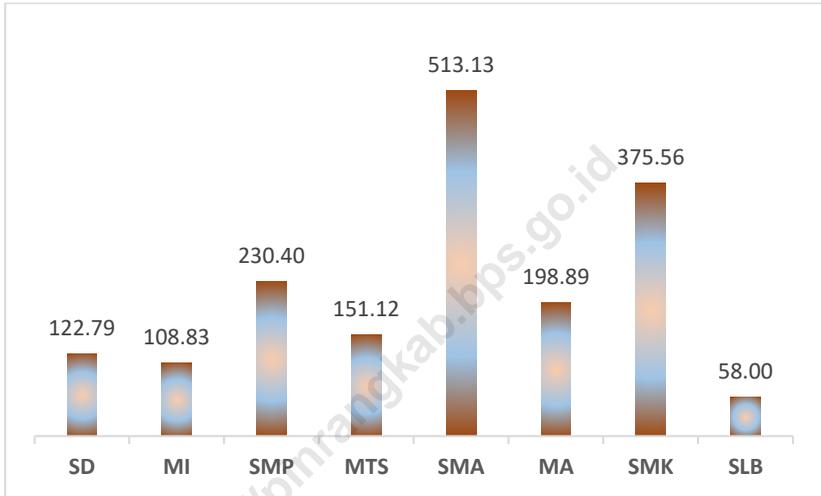
Kementerian Agama, data semester ganjil tahun ajaran 2023/2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, jumlah sekolah baik negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan SD sebanyak 328 sekolah, MI sebanyak 29 sekolah, SMP sebanyak 57 sekolah, MTs sebanyak 26 sekolah, SMA sebanyak 15 sekolah, MA sebanyak 9 sekolah, SMK sebanyak 16 sekolah, dan 1 SLB. Jumlah seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 adalah 481 sekolah dengan jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat. Dalam 481 sekolah tersebut terdapat murid/ siswa sebanyak 76.048 siswa dan tenaga pendidik (guru) sebanyak 6.367 guru. Sama halnya dengan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik dan jumlah murid yang terbesar berada pada tingkat pendidikan SD.

6.2. Rasio Murid/ Siswa terhadap Sekolah dan Guru

Gambar 5 memperlihatkan rasio murid terhadap sekolah untuk semua jenjang di Kabupaten Pinrang tahun 2023. Indikator ini menunjukkan daya tampung rata-rata untuk setiap jenjang pendidikan. Daya tampung SD di Kabupaten Pinrang adalah 122,79 murid. Hal ini berarti bahwa rata-rata setiap SD di Kabupaten Pinrang mampu menampung antara 122 sampai 123 murid pada satu sekolah tersebut. Untuk MI, rata-rata daya tampung setiap sekolah di Kabupaten Pinrang adalah antara 108 sampai 109 murid di satu MI.

Pada jenjang sekolah menengah, rata-rata daya tampung setiap SMP di Kabupaten Pinrang adalah 230 sampai 231 murid di satu SMP. Sementara itu, daya tampung setiap MTs di Kabupaten Pinrang adalah 151 sampai 152 murid di satu MTs.



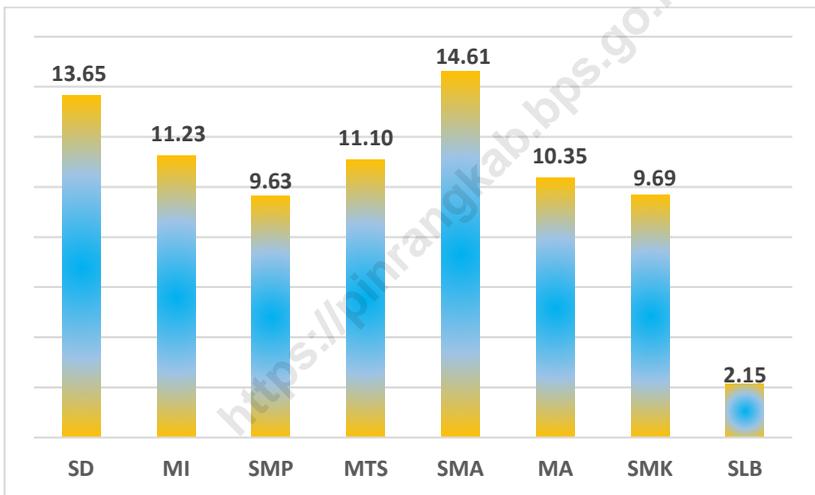
Sumber: Tabel 4 diolah

Gambar 5. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pinrang, 2023

Pada jenjang yang lebih tinggi, daya tampung rata-rata setiap SMA di Kabupaten Pinrang adalah 513 sampai 514 murid di tiap SMA dan untuk MA adalah 198 sampai 199 murid di tiap sekolah. Selanjutnya SMK memiliki daya tampung rata-rata antara 375 hingga 376 murid. Terakhir, untuk SLB di Kabupaten Pinrang daya tampungnya adalah 58 murid di satu sekolah.

Gambar 6 menunjukkan rasio murid terhadap guru, di mana dapat dilihat beban mengajar untuk setiap guru. Rata-rata beban mengajar satu orang guru SD di Kabupaten Pinrang adalah 13 sampai 14 orang murid

sedangkan guru MI adalah 11 hingga 12 murid. Pada jenjang SMP, rata-rata seorang guru memiliki beban adalah antara 9 sampai 10 murid. Rata-rata beban guru MTs di Kabupaten Pinrang adalah antara 11 hingga 12 murid. Pada jenjang SMA, beban guru SMA rata-rata adalah 14 sampai 15 murid sedangkan pada MA, beban guru rata-rata antara 10 sampai 11 murid. Sementara itu, pada jenjang SMK setiap guru memiliki beban ajar sekitar 9 sampai 10 murid. Guru SLB mempunyai beban rata-rata mengajar 2 hingga 3 murid.



Sumber: Tabel 4, diolah

Gambar 6. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2023

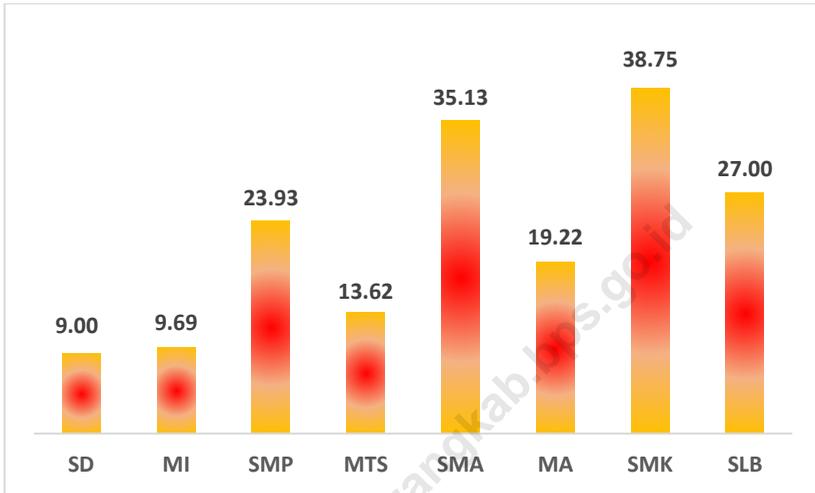
Semakin tinggi nilai rasio murid terhadap guru berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid sedangkan pada jenjang SMK

idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. Dari Gambar 7 terlihat bahwa rasio murid-guru jenjang SD sampai SMA di Kabupaten Pinrang sudah cukup ideal dengan standar yang sudah ditetapkan.

Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak penentu keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan. Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.

Informasi pada Gambar 7 menunjukkan rata-rata jumlah guru yang mengajar pada satu sekolah. Pada jenjang SD, tiap sekolah rata-rata memiliki 9 guru sedangkan jenjang MI rata-rata memiliki 9 sampai 10 orang guru. Pada jenjang yang lebih tinggi, rata-rata setiap sekolah memiliki guru yang lebih banyak. SMP rata-rata memiliki 23 sampai 24 guru sedangkan MTs memiliki 13 sampai 14 guru. Jenjang SMA memiliki 35 sampai 36 guru per sekolah sedangkan MA memiliki guru yang relatif lebih sedikit. SMK merupakan jenjang dengan rata-rata jumlah guru

terbanyak yaitu 38 hingga 39 guru per sekolah. Di sisi lain, pada SLB rata-rata memiliki 27 guru.



Sumber: Tabel 4, diolah

Gambar 7. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2023

<https://binrangkab.bps.go.id>

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Dari hasil kajian data Susenas Maret 2023 sebelumnya, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang, antara lain:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (0-6 tahun) baru mencapai 21,35 persen di tahun 2023, meningkat 3,64 persen poin apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 17,71 persen. Hal ini menandakan suatu hal yang baik mengingat pentingnya Pendidikan usia dini (prasekolah) untuk menunjang pendidikan usia sekolah, maka program ini perlu makin dipacu terutama di beberapa kecamatan di Kabupaten Pinrang yang belum ada fasilitas PAUD. Perlu juga ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini, mengingat ada beberapa fasilitas PAUD tidak beroperasi lagi dikarenakan tidak ada siswa yang mendaftar.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di Kabupaten Pinrang, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh rendahnya partisipasi sekolah baik dari penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

3. Hingga tahun 2023 masih terdapat 5,18 persen penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara).
4. Partisipasi penduduk Kabupaten Pinrang dalam menempuh pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi tahun 2023 masih perlu ditingkatkan karena persentase penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan yang tinggi semakin berkurang dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.
5. Pada tahun ajaran 2023/2024 semester ganjil, jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sebanding dengan banyaknya sekolah pada jenjang SD/MI.
6. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Pinrang pada tahun ajaran 2023/2024 semester ganjil sudah cukup ideal sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai rasio, beban kerja guru dalam mengajar juga semakin besar, oleh karena itu akan semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

<https://binrangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2023. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. *Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Borjas, G. J. (2019). *Labor Economics* (Eight). Mc Graw Hill Education.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Versi 14 Agustus 2019)*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.

<https://binrangkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. RSE Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2023

Karakteristik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7-12 tahun	0,73	0,00	0,38
13-15 tahun	5,47	3,67	3,17
16-18 tahun	8,48	11,04	6,99
19-23 tahun	22,40	20,51	15,63
APM			
SD	0,73	0,22	0,39
SMP	10,07	9,58	6,90
SMA	12,64	11,18	8,52
PT	22,82	21,25	16,06

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 2. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2023

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	75,28 ²	8,03	17,74	14,10	12,36
Perempuan	60,42 ²	8,38	16,20	12,12	13,61
Kabupaten Pinrang					
	47,15 ¹	5,88	11,95	9,85	9,72

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 3. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2023

Karakteristik	Tidak	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
	Punya Ijazah SD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	10,75	6,95	7,44	6,04
Perempuan	9,73	6,72	7,91	5,40
Kabupaten Pinrang				
	8,62	5,60	5,61	4,69

Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

ST 2023

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No. 18 Pinrang Sulawesi Selatan

Telp : (0421) 921021

e-mail : bps7315@bps.go.id

website : pinrangkab.bps.go.id